

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
PERANGKAT DAERAH : BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan

Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel merupakan salah satu unit kerja dan bagian integral dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan pasal 48 maka Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan badan usaha milik daerah serta badan layanan umum daerah.

2. Sasaran

Adapun Sasaran Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel, yaitu untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 tersebut diatas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi yang diatur dalam pasal 51 yaitu :

- a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;

- b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

3. Belanja, Program APBD dan program APBN

a) Belanja Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, setelah efisiensi memiliki anggaran belanja langsung sebesar **Rp 3.299.070.619,-** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

b) Program dan Anggaran APBD

Di Tahun Anggaran 2025 Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan memiliki, 4 (empat) Program, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 756.240.144,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus empat puluh empat);
- 2) Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dengan anggaran sebesar Rp 820.481.900,- (delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- 3) Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, dengan anggaran sebesar Rp 821.478 575,- (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 4) Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp 900.870.000,- (sembilan ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

c) Program dan Anggaran APBN

Untuk Tahun Anggaran 2025 Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki Program dan anggaran APBN.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan IV 2025 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN:

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Biro Perekonomian
Tahun Anggaran 2025/Triwulan IV

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi sTriwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	3.299.070.619	2.628.227.092	100	79,67	100	79,67
Belanja Operasi	3.221.252.619	2.551.549.092	100	79,20	100	79,20
Belanja Modal	77.818.000	76.678.000	100	98,54	100	98,54

Belanja Tidak Terduga	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan

Biro Perekonomian

Nomor Satker / Nama Program / Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)		
4.01.0.00.0.00.06.0004	3.299.070.619	2.628.227.092	79,67	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	756.240.144	643.778.988	85,13	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.886.000	110.382.500	64,97	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	25.000.000	-	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.793.000	281.725.488	94,60	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.818.000	76.678.000	98,54	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.743.144	174.993.000	94,21	-
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	820.481.900	713.385.694	86,95	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	489.313.500	455.125.621	93,01	-
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	331.168.400	258.260.073	77,98	-
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	821.478.575	515.176.470	62,71	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	224.786.000	220.109.524	97,92	-

Koordinasi, Sinkronisasi & Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	238.188.125	140.443.358	58,96	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	358.504.450	239.163.588	66,71	-
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	900.870.000	671.345.940	74,52	-
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	128.068.350	107.946.198	84,29	-
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	103.412.500	43.070.323	41,65	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	493.770.500	373.549.563	75,65	-
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	101.694.650	90.101.201	88,60	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	73.924.000	56.678.655	76,67	-